

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. (2012). *Ilmu dan seni kepemimpinan*. Jakarta: Mitra wacana Media.
- Azwar, S. (2009). *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahari. (2010). *Toleransi beragama mahasiswa Studi tentang pengaruh kepribadian , keterlibatan organisasi, hasil belajar pendidikan agama dan lingkungan Pendidikan terhadap toleransi beragama pada 7 perguruan tinggi umum negeri*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama.
- Bakar, A. (2015). Konsep toleransi dan kebebasan beragama. *Jurnal media komunikasi*.123-131.
- Bauer, J.C. (2003). Role Ambiguity and Role Clarity : A Comparison of Attitude in Germany and the United States. *Dissertation*: University of Cincinnati-Clermont.
- Bbc.com. (05 Oktober 2016). Diskriminasi ras di Yogyakarta :kenapa keturunan cina tak boleh punya tanah?. Diambil dari https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161005_majalah_tanah_yogyakarta
- Bbc.com. (12 Desember 2016). Kisah dibalik penurunan baliho mahasiswa berjilbab. Diambil dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38288249>
- Cnnindonesia.com. (10 Agustus 2016). Yogyakarta kota yang makin tak toleran. Diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160808211440-20-150068/yogyakarta-kota-yang-makin-tak-toleran>
- Darmadi, H. (2013). *Metode penelitian pendidikan dan sosial*. Bandung: Alfabeta
- Detik.com. (04 Oktober 2018). Mahasiswa Papua di Jogja mengaku terancam .Diambil dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4242395/mahasiswa-papua-di-yogya-mengaku-terancam-ini-respons-sultan>.
- E.St Harahap, dkk. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka.
- Forum kerukunan umat beragama(perh).(2015). *Panduan Hidup Rukun Bersaudara Menurut Islam Kristen Katolik Hindu Budha*. Yogyakarta :
- Ginting, R. (2009). Toleransi dalam masyarakat plural. *Jurnal upgris*.612-619
- Grim, Brian dan Finke. (2006). Internasional religion indexes: government regulation government favoritism, and social regulation of religion. *Interdisciplinary journal of research on religion* 2 (article 1).
- Gutman, Amy dan Thompson. (2004). *Why deliberative democracy ?*. United Kingdom: Princeton University Press
- Hamzah, I.(2015). Peran kontrol sosial dalam pengendalian perilaku mahasiswa kos sekitar kampus Universitas Mulawarman Samarinda.*Jurnal Sosiologi*.124-137.
- Hukum.jogjakota.go.id. (02 Maret 2019). Dokumentasi dan informasi hukum Kota Yogyakarta. Diambil dari <https://hukum.jogjakota.go.id/>

- Ismail, B. (1993). *Negara hukum demokrasi toleransi (telaah filosofi atas John Locke)*. Jakarta: Intermedia
- Ismail, T. R. (2014). *Dinamika kerukunan dalam umat beragama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hoeroepoetri, dkk. (2003). *Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Jati, S.G. (2015). Meningkatkan toleransi siswa kelas vii SMP Negeri 1 Salam melalui penerapan strategi DAP (*Development Appropriate Practice*) dalam pembelajaran pendidikan agama islam. *Skripsi*: Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Jogja.antaranews.com. Kota Yogyakarta raih penghargaan bidang sanitasi. (24 September 2014). Diambil dari <https://jogja.antaranews.com/berita/325794/kota-yogyakarta-raih-penghargaan-bidang-sanitasi>
- Kamil, M. (2018). Cultural tolerance, diversity and pluralism: the recognition of Yogyakarta as the city of tolerance. *Jurnal Logos*. 23-36.
- Ketetapan DPRD Nomor 2 Tahun 1952 Tentang Penerapan Lambang Kota Praja Yogyakarta
- Jogjakota.go.id. (25 Februari 2018). Profil Kota Yogyakarta. Diambil dari <https://www.jogjakota.go.id/pages/visi-dan-misi> .
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan pembangunan daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan, H. W. (2017). Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Liputan6.com. (12 Desember 2018). Kronologi pelemparan batu di mesjid jogokariyan oleh simpatisan partai. Diambil dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3881395/kronologi-pelemparan-batu-di-masjid-jogokariyan-oleh-simpatisan-partai>
- Lumi, H. (2015). Peranan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan konflik antar kelompok. *Skripsi*. Manado: Universitas Samratulangi.
- Maharika, F.I. (2015). Toleransi, Konflik dan Ruang: Tantangan Untuk Yogyakarta Sebagai *City Of Tolerance* Makalah dipresentasikan pada Seminar "Revitalisasi Yogyakarta Sebagai *City Of Tolerance*" UII, 24-25 November 2015, Yogyakarta.
- Masyitoh, M. (2017). Adaptasi mahasiswa Papua di Yogyakarta. *Thesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Merdeka.com. (17 Juli 2016). Pengepungan mahasiswa Papua di Yogyakarta melanggar HAM. Diambil dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/pengepungan-mahasiswa-papua-di-yogyakarta-melanggar-ham.html>
- Merdeka.com. (20 Oktober 2017). Ada penolakan, kebaktian di Yogyakarta dibatalkan. Diambil dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/ada-penolakan-kebaktian-di-yogyakarta-dibatalkan.html>

- Merdeka.com. (06 Juni 2016). Mahasiswa asal papua tewas dianiyaya di depan gedung agung Yogyakarta. Diambil dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/mahasiswa-asal-papua-tewas-dianiaya-di-depan-gedung-agung-yogya.html>.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J.(2014). *Qualitative data analysis a methods source book, edition 3*. USA: Sage Publication. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Muryana. (2017). Kebebasan ekspresi keagamaan di Yogyakarta *city of tolerance*. *Jurnal studi agama*.1-20
- Nation, U. (2009). *Declaration On The Elimination Of All Form Of Intolerance Discrimination Based On Religion And Belief. 70th Plenary Meeting* (p. 3). General Assembly.
- Nasional.tempo.com. (20 desember 2018). Pemotongan tanda salib dianggap indikasikan pelemahan demokrasi. Diambil dari <https://nasional.tempo.co/read/1157220/pemotongan-tanda-salib-dianggap-indikasikan-pelemahan-toleransi/full&view=ok>
- Nawawi. (2003). *Metode penelitian bidang sosial*.Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- News.detik.com. (04 Oktober 2018). Mahasiswa Papua di Yogya mengaku terancam, ini respon Sultan. Diambil dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4242395/mahasiswa-papua-di-yogya-mengaku-terancam-ini-respons-sultan>
- News.okezone.com. (03 Maret 2011). Yogyakarta Dikukuhkan Sebagai Kota Toleran.Diambil dari <https://news.okezone.com/read/2011/03/03/340/431098/yogyakarta-dikukuhkan-sebagai-kota-toleran>
- News.detik.com. (17 mei 2016). Hasil indeks kota islami tempatkan Yogyakarta di urutan pertama. Diambil dari <https://news.detik.com/berita/3212356/hasil-indeks-kota-islami-tempatkan-yogyakarta-di-nomor-pertama>
- Novriansa, A. (2016). Role Conflict and Role Ambiguity On Local Government Internal Auditors: The Determinant And Impact. *Jurnal Of Indonesian Economy and Business*.63-80.
- Nuah,V.Y. (2016). Peran pemerintah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado. *Skripsi*.Yogyakarta:Universitas Negeri Yogyakarta
- Peraturan Gubernur DIY Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik Sosial
- Peraturan Walikota Tahun 2018 Tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat Bergama dan pendirian rumah ibadat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah
- Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pratiwi, I.Y.(2016). Stereotip dan diskriminasi terhadap wong timur : Respon terhadap mahasiswa pendatang di Yogyakarta.*Thesis*. Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada.

Radioedukasi.kemendikbud.go.id. (23 Februari 2017). ICMI DIY kokohkan Yogyakarta sebagai *city of tolerance*. Diambil dari <http://radioedukasi.kemendikbud.go.id/read/1482/icmi-diy-kokohkan-yogyakarta-sebagai-city-of-tolerance.html>

Randa, I.R. (2017). Sikap toleransi mahasiswa lintas etnis dan agama di asrama bujang Malaka Kabupaten Bulu Raya.*Skripsi*.Pontianak:Universitas Tanjung Pura.

Rasimin. (2016). Toleransi dan kerukunan umat beragama di masyarakat Randuacir.*Jurnal komunikasi*.508-528.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022

Rencana Strategi (Renstra) Pemerintah daerah Kota Yogyakarta tahun 2017-2022

Rencana Strategi (Resntra) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta 2017-2022

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025

Rumagit, S. K. (2013). Kekerasan dan Diskriminasi Antar Umat Beragama. *Lex Administration Vol 2*, 56-64.

Setiadi, D, dkk.(2011). *E-Boook Sosiologi Dasar 2 SMA Kelas X Semester 2*. Cianjur:SMA Negeri 1 Cianjur

Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta:Rajawali Pers.

Soenarso. (2013). *Perbandingan Sistem Pemerintahan*.Yogyakarta:Penerbit Ombak

Siswanto, A.Z. (2013). Peran pemerintah kota Tarakan dalam rekonsiliasi konflik etnis dayak Tidung dan bugis Letta tahun 2010.*Skripsi*.Yogyakarta:Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Suarapapua.com. (17 Juli 2018). Hari diskriminasi mahasiswa Papua dalam keistimewaan Yogyakarta.Diambil dari <http://suarapapua.com/2018/07/17/15-juli-hari-diskriminasi-terhadap-mahasiswa-papua-dalam-keistimewaan-yogyakarta/>

Sulaeman. (2017). Konflik Sosial Mahasiswa Papua di Yogyakarta. *Skripsi*.

Sugiyono.(2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharjiantoro. (2017). Strategi penanggulangan komunitas Gafatar dalam rangka mewujudkan keamanan negeri yang kondusif. *Jurnal Nestor Magister Hukum*.126-141

Syani, A. (2007). *Sosiologi skematika, teori dan terapan*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara.

TAP MPR Nomor : VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa

Thalis, A. (2018). Peran pemerintah Kabupaten Bolaang Mongodow Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Skripsi*: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Tilman, Diane. (2004). *Pendidikan nilai untuk kaum muda dewasa* (Terjemahan Risa Prasono). Jakarta: Grasindo

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Wartakota.tribunnews.com.(14 Februari 2019). Sri Sulthan HB X buka pekan budaya tionghoa Yogyakarta 13-19 Februari 2019. Diambil dari <http://wartakota.tribunnews.com/2019/02/14/sri-sultan-hb-x-buka-pekan-budaya-tionghoa-yogyakarta-13-19-februari-2019>

Zudianto, H. (2008). *Kekuasaan sebagai wakaf politik "Manajemen Yogyakarta sebagai kota multikultural"*. Yogyakarta: Kanisius dan Impulse.